

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa sub bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen riset, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang masalah penulis akan berfokus pada pengenalan apa itu perdagangan manusia dan bagaimana perdagangan manusia masuk ke Amerika Serikat. Selain itu juga akan membahas bagaimana perdagangan manusia di era Presiden Obama dan sedikit pembahasan mengenai perdagangan manusia di era Presiden sebelumnya yaitu George W. Bush.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut *United Nation Human Right Office of The High Commissioner*, perdagangan manusia merupakan suatu tindakan dimana suatu individu berada pada situasi eksploitatif demi mendapatkan suatu keuntungan ekonomi dan tindakan ini bisa terjadi dalam suatu negara maupun dalam pergerakan lintas batas suatu negara dengan negara lainnya. Perdagangan ini biasanya bertujuan untuk melakukan kerja paksa, eksploitasi seksual, dan pernikahan paksa dimana korbannya bisa terjadi pada laki-laki, perempuan maupun anak-anak dibawah umur. Perdagangan manusia pada masa ini telah berkembang dan lebih dikenal sebagai perbudakan modern dimana jenis perdagangan manusia ini lebih berfokus pada kejahatan yang memaksa korban untuk melakukan pekerjaan berupa jasa tenaga dan layanan seks komersial. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai cara baik itu secara terang-terangan, secara fisik atau kekerasan, secara psikologis dan lain sebagainya

(United Nations Human Rights office of the High Commissioner, 2014).

Menurut Laczko dan Gozdzik perdagangan manusia adalah kejahatan yang menjadi bisnis ilegal terbesar kedua setelah perdagangan senjata di dunia dimana dalam menipu korbannya para pelaku perdagangan manusia biasanya memberikan janji pekerjaan pada para korban yang kemudian menjual mereka dengan kisaran \$3000 - \$13.000 dollar (Barr, 2019). PBB sendiri menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis perdagangan manusia yang terjadi secara global dan masih banyak orang yang berpikir bahwa perdagangan manusia identik dengan perbudakan seksual. Menurut PBB terdapat beberapa alasan mengapa perdagangan manusia bisa terjadi dimana alasan ini mencakup pada beberapa hal seperti kerja paksa, perdagangan organ, tentara militer, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Perdagangan manusia bisa dilakukan dengan dua cara diantaranya adalah dengan cara internasional dan domestik dimana perdagangan secara internasional adalah orang-orang yang diperdagangkan dengan melewati lintas batas suatu negara atau perbatasan internasional. Pada beberapa tahun yang lalu sebelum globalisasi dan teknologi menjadi perbincangan dan hal biasa bagi masyarakat sehari-hari tingkat perdagangan manusia secara domestik masih sangat tinggi. PBB mencatat bahwa pada 2007 hingga 2010 perdagangan manusia secara domestik meningkat dimana dari 134 negara kasus perdagangan manusia di negara asal meningkat dari 19% menjadi 31%.

Tindakan pencegahan kejahatan perdagangan manusia sudah dilakukan oleh banyak pihak baik itu pemerintah maupun organisasi berbasis domestik maupun internasional. *Human Rights Watch* yang merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang penyelidikan dan pendokumentasian tindakan

pelanggaran hak asasi manusia adalah salah satu organisasi non pemerintah yang juga terlibat dalam penghentian tindakan perdagangan manusia yang terjadi di dunia. *Human Rights Watch* bekerja dengan melakukan investigasi atau pencarian fakta mengenai tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dunia dan memantau berbagai negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran pada deklarasi universal mengenai hak asasi manusia di negara negara tersebut (Britannica, 1988). *Human Right Watch* melakukan beberapa upaya seperti melakukan dokumentasi serta melakukan pemantauan perdagangan manusia di seluruh dunia. Selama ini *Human Rights Watch* telah menerbitkan banyak laporan termasuk perdagangan perempuan dan anak. Pada saat ini *Human Rights Watch* juga sudah sering melakukan penelitian dan laporan mengenai penganiayaan pekerja rumah tangga dengan visa berbasis majikan khusus di wilayah Amerika Serikat.

Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya di dunia pada saat ini telah menjadi salah satu negara dengan angka perdagangan manusia terbesar di dunia. Lembaga federal Amerika melakukan pengumpulan data mengenai angka korban perdagangan manusia yang terjadi tiap tahunnya. Dalam laporan federal terbaru diketahui bahwa sekitar 14.500 hingga 17.500 korban perdagangan manusia dijual di dan ke Amerika Serikat setiap tahunnya (Barr & Agnes, 2019). Bahkan pada catatan tahun 2018 terdapat sekitar 10.949 kasus perdagangan manusia yang tercatat di Amerika dan California menjadi salah satu lokasi perdagangan manusia terbesar di negara adidaya tersebut (Barr & Agnes, 2019). Kasus perdagangan manusia terbaru akhir akhir ini di wilayah Amerika Serikat adalah kasus penangkapan Jamel Muldrew di Florida Amerika Serikat pada 29 April 2021 karena melakukan perdagangan seks anak dibawah umur, transportasi prostitusi antar negara dan pembajakan orang dengan

kedok bepergian antarnegara dan berakhir menjadi prostitusi. Muldrew diketahui telah melakukan perdagangan anak dibawah umur di seluruh wilayah negara bagian Amerika Serikat mulai dari Texas, New Jersey, Maryland, North Carolina, Georgia, California dan terakhir Florida dimana dirinya ditangkap.

Melihat bagaimana tingginya angka perdagangan manusia di Amerika Serikat, Barack Obama yang merupakan presiden Amerika Serikat ke-44 sangat memperhatikan upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di negaranya. Pasca terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, Barack Obama memerintah Amerika dengan upaya *Anti-Trafficking* sebagai prioritas kepemimpinannya. Obama sangat menekankan penghapusan kesenjangan rasial serta stigma perbudakan pada pemerintahan Amerika. Salah satu kebijakan mengenai pencegahan perdagangan manusia milik Barack Obama yang paling terkenal adalah *Trafficking Victim Protection Act (TVPA)* dimana Obama kemudian bekerjasama dengan Mexico yang merupakan negara tetangga Amerika dengan warga negara paling banyak memasuki wilayah Amerika Serikat (Hanifah et al., 2016).

Akan tetapi, selama Obama memerintah sebagai presiden Amerika kasus perdagangan manusia masih merajalela, kasus perdagangan manusia yang terjadi didominasi oleh kasus *sex trafficking* yang bisa mencapai angka lebih dari 5000 kasus setiap tahunnya dan persentase mencapai 75%. Kasus perdagangan manusia lainnya berada pada kasus *labor* dengan persentase 13%, *sex and labor* dengan presentase 4% dan sisanya menjadi kasus perdagangan manusia tak teridentifikasi. Selain itu demografi korban di Amerika pada masa Obama mencapai lebih dari 3.200 orang dewasa dan lebih dari 1.600 korban dibawah umur dengan total 4.100 korban diantaranya adalah perempuan. Amerika juga menjadi negara dengan

negara asal perdagangan manusia terbesar di dunia pada saat itu dibandingkan negara negara lainnya didunia yaitu mencapai hampir 30% (NHTRC, 2015). Dilihat dari angka kasus perdagangan manusia ini diketahui bahwa Presiden Barack Obama yang telah secara aktif melakukan tindakan pencegahan perdagangan manusia dan menerapkan kebijakannya belum mampu secara optimal mencegah serta menghilangkan kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat. Disinilah kemudian Presiden Obama menyediakan bagi organisasi organisasi baik yang bersifat regional maupun internasional untuk membantu. Disinilah kemudian *Human Rights Watch* masuk dan menekan pemerintah untuk menangani kasus perdagangan manusia dengan jauh lebih baik lagi. kemudian mendesak Kongres untuk mengamandemen TVPA dimana pada masapemerintahan Presiden Barack Obama, kebijakan ini menjadi kebijakan utama pemerintahan tetapi masih belum bisa dijalankan dengan baik terutama masih banyak anggota pemerintahan yang lalai dalam menegakan kebijakan ini, seperti bagaimana kemudian di perbatasan Amerika-Mexico masih banyak penjaga perbatasan yang tidak menekankan kebijakan ini dan membiarkan banyak imigran ilegal yang diselundupkan sebagai korban perdagangan masuk ke Amerika Serikat. mendorong dan menekan amandemen TPVA ini bertujuan untuk memperkuat efektivitasnya dalam mengatasi akar penyebab perdagangan manusia dan kerja paksa. Tekanan tekanan lain juga dilakukan oleh *Human Rights Watch* ini termasuk mengevaluasi program anti-perdagangan manusia dan meninjau kembali ketentuan TVPA yang memiliki efek kontraproduktif (Human Right Watch, 2007).

Tekanan atas peninjauan Kembali TVPA ini sebenarnya dipicu oleh beberapa hal diantaranya adalah fakta bahwa TVPA yang telah ada sejak tahun 2000 dan selalu diotorisasi setiap dua tahun tidak berjalan dengan semestinya di tengah-tengah masa pemerintahan Presiden

Barack Obama. Pengesahan otorisasi TVPA yang biasanya berjalan dengan lancar kemudian sempat dihentikan dikarenakan adanya penahanan oleh pihak oposisi partai republik terhadap desakan pemerintahan Obama mengenai undang-undang untuk menyediakan layanan Kesehatan reproduksi bagi para korban *sex trafficking*. Undang-undang tersebut berhenti pada pertengahan jabatan presiden Obama pada tahun 2011 dan lebih dari satu tahun lamanya kongres gagal untuk menggerakkan Kembali undang-undang tersebut. Selain itu TVPA diusulkan untuk menjadi bagian dari amandemen otoritas VAWA, yaitu undang-undang yang digunakan untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Akan tetapi kebaikan itu dianggap beresiko. Disinilah *Human Rights Watch* kemudian menekan pemerintahan Obama untuk meninjau Kembali TPVA. *Human Rights Watch* ingin TVPA yang beberapa waktu bergejolak dan dihentikan kemudian mendapatkan otorisasi ulang sebagai amandemen yang mendorong kebijakan pemberhentian dan pencegahan perdagangan manusia di Amerika Serikat (News & Markets, 2013).

Sebelum presiden Barack Obama memimpin Amerika Serikat, *Human Right Watch* telah memperhatikan dan melakukan advokasi mengenai kasus perdagangan manusia ini pada pemimpin sebelumnya yaitu presiden George W. Bush. Berbeda dengan tekanan yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Obama, tekanan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* pada masa itu difokuskan pada permohonan untuk meratifikasi Kembali kebijakan visa khusus yang muncul pasca terjadinya tragedi 9/11. Dari hasil laporan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch*, visa khusus ini cenderung memfasilitasi tindak pelanggaran hak asasi terutama hak asasi pekerja migran. Hal ini bisa terjadi karena dengan visa khusus ini para pekerja rumah tangga sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia dan ditipu

mengenai kondisi pekerjaan mereka dimana saat mereka dibawa ke Amerika Serikat mereka akan ditahan di menjadi budak atau pekerja paksa. Tindak kejahatan ini juga cenderung terjadi dimulai dari para korban yang akan dipaksa bekerja lebih dari ketentuan jam kerja nasional Amerika Serikat dengan gaji yang sangat di bawah upah minimum dan jarang diizinkan untuk meninggalkan tempat kerja atau rumah majikan mereka dan kemudian dijadikan sebagai sasaran pelecehan baik itu secara fisik, psikologis maupun secara seksual. Dengan adanya kebijakan visa khusus yang dikenal sebagai “visa majikan” jika suatu pekerja meninggalkan tempat majikan mereka akibat tindak kekerasan, tindak seksual dan lainnya maka secara otomatis status imigrasi milik korban tidak akan berlaku di Amerika Serikat (Human Right Watch, 2002).

Selain tekanan mengenai ratifikasi kebijakan visa khusus terhadap imigran oleh *Human Right Watch* pada masa pemerintahan presiden Bush, *Human Right Watch* juga menekankan pada kebijakan mengenai imigran ilegal dimana pasca tragedi 9/11 kebijakan mengenai reformasi imigran ilegal dan tanggung jawab imigran 1996 telah melemah pasca terjadinya tragedi 9/11 dimana dengan adanya tragedi 9/11 sentimen terhadap migran dan imigran ilegal menjadi sangat tinggi. menekan Presiden Bush untuk melakukan tindakan dengan mengatur status paraimigran ilegal yang telah di tangkap seperti kasus 3 juta pekerja ilegal meksiko yang masuk melalui perdagangan budak dan lainnya dimana mereka tidak berdokumen dan telah menetap di Amerika Serikat. juga menekan pemerintahan Bush untuk menegakan hak imigran baik yang legal maupun ilegal yang sebelumnya tertangkap untuk di tinjau terlebih dahulu kasusnya sebelum dideportasi. Tekanan mengenai kebijakan ini kemudian berhasil dimana kemudian pada bulan Juni 2002 pihak mahkamah agung Amerika serikat mengeluarkan putusan mengenai penegakan hak imigran di Amerika Serikat

dimana mereka akan melakukan tinjauan kasus sebelum melakukan deportasi pada para imigran. dan organisasi hak asasi manusia lainnya juga kemudian bekerja sama untuk membebaskan 5.000 tahanan anak tiap tahunnya pasca 9/11 dimana diketahui hampir semua anak-anak yang ditahan merupakan korban penipuan dan perdagangan manusia yang masuk ke Amerika Serikat. dan organisasi hak asasi manusia lainnya mengkritik penahanan imigran-anak ini dan menolak pemantauan secara penuh yang dilakukan pada anak-anak yang ditahan (Human Rights Watch, 2002).

Melihat dari kasus di atas bisa dilihat bahwa sebagai negara adidaya dan super power, Amerika kemudian masih memerlukan bantuan bahkan mengalami tekanan dari organisasi internasional yang ada seperti *Human Rights Watch*. juga dipilih sebagai objek penekanan dikarenakan bagaimana *Human Rights Watch* telah menjadi salah satu NGO hak asasi manusia yang telah menekan Amerika Serikat untuk menangani kasus perdagangan manusia sejak lama dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* ini cenderung berhasil untuk direalisasikan. Contohnya adalah bagaimana kemudian *Human Rights Watch* berhasil menekan pemerintahan George W. Bush untuk meninjau kembali kebijakan imigran ilegal yang berhasil ditangkap dan ditemukan. Keberhasilan ini memunculkan kebijakan dimana MA Amerika kemudian akan melakukan tinjauan kasus pada para imigran ilegal sebelum melakukan deportasi.

Dengan keberhasilan yang ada *Human Rights Watch* mendorong untuk melakukan penekanan pada masa pemerintahan Obama pula, dimana pada saat itu terdapat fakta bahwa pada masa pemerintahan Obama terutama pada tahun 2008 hingga 2012 terjadi peningkatan kasus perdagangan manusia di Amerika dan para korban di

dominasi berasal dari negara tetangganya Mexico dimana pada masa itu terjadi migrasi besar besaran dari Mexico yang didorong oleh meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan, penganiayaan rumah tangga dan tingginya korupsi yang terjadi di Mexico. Selain itu adanya keterlibatan dari penegak hukum lokal dan pejabat imigrasi yang terlibat dalam tindakan penyuapan menyulitkankingkat pelaporan korban ke pemerintahan Amerika pada saat itu (Acharya, 2010). Selain itu sempat ada kritikan yang muncul dari beberapa politisi Amerika pada pemerintahan Obama mengenai laporan tahunan perdagangan manusia di Amerika. Marco Rubio sebagai senator Amerika saat itu bahkan mengatakan sangat memalukan bahwa presiden Obama membiarkan sekelompok peretasan politik untuk mengubah laporan perdagangan manusia demi kepentingan. Bahkan kelompok hak asasi manusia dan beberapa mantan pejabat Departemen Luar Negeri telah menyatakan keprihatinan bahwa nilai yang lebih tinggi yang tidak diterima seperti itu merusak kredibilitas laporan tahunan (Home et al., 2015).

Ini juga lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas tekanan *Human Right Watch* pada isu perdagangan manusia era Presiden Barack Obama. Selain karena masalah diatas, diketahui bahwa *Human Right Watch* memiliki banyak alasan lain untuk melakukan penekanan di masa pemerintahan Presiden Barack Obama ini, seperti fakta bahwa disamping kesuksesan yang didapatkan oleh *Human Right Watch* mengenai penekanan isu imigrasi dan visa majikan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush terlalu banyak pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di era Bush ini akibat tragedi 9/11 yang tidak bisa diselesaikan selama Bush menjabat. *Human Right Watch* perlu melakukan tekanan lebih di masa pemerintahan

Presiden Barack Obama sehingga isu hak asasi manusia yang terjadi di era Bush bisa diselesaikan dan dihentikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana *Human Right Watch* melakukan upaya penekanan terhadap tindakan pemerintahan Presiden Barack Obama dalam menangani isu *Human Trafficking*?

C. Kerangka Pemikiran

Pressure group atau kelompok penekan merupakan suatu kelompok yang terbentuk oleh kelompok individu yang memiliki kepentingan nilai atau keyakinan yang sama baik itu secara agama, etnis, politik, filosofi atau tujuan bersama lainnya dimana kemudian berdasar kepada hal tersebut kelompok ini memunculkan tindakan-tindakan untuk melakukan promosi perubahan demi kemajuan dari tujuan mereka. Kelompok penekan sendiri biasanya muncul diakibatkan oleh munculnya ketidakpuasan masyarakat pada hal tertentu. Kelompok penekan cenderung bergerak untuk mengekspresikan keyakinan mereka untuk mempengaruhi dan memberikan perubahan pada komunitas dan struktur sosial politik yang ada (Columbia University, 2018). Selain itu *Pressure group* atau kelompok penekan juga cenderung dikenal sebagai kelompok lobi serta kelompok kepentingan. Beberapa kelompok kepentingan bahkan mewakili orang-orang di negara tertentu bahkan di seluruh dunia serta mereka cenderung berfokus pada penyebab atau hal-hal yang bersifat khusus. Kelompok penekan secara efektif melakukan advokasi dalam hal-hal tertentu pada pemerintahan dan melakukan penekanan terhadap pemerintah tersebut untuk memajukan suatu kebijakan sesuai dengan isu yang kelompok penekan tersebut isukan (Transparency International, 2012). *Pressure group*

cenderung berusaha untuk memberikan pengaruh dari luar dan tidak bergerak untuk memenangkan atau bahkan menjalankan suatu kuasa pemerintahan. Mereka tidak melakukan dan mengesahkan suatu kebijakan tetapi lebih mempengaruhi para pemerintah dalam membuat kebijakan yang jauh lebih akurat pada suatu isu tertentu. Mereka juga memiliki focus isu yang sempit dan pada kasus tertentu saja, HAM misalnya. Anggota mereka muncul dengan tujuan untuk mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan sesuai isu yang mereka angkat (Columbia University, 2016).

Secara teori *pressure group* atau kelompok penekan adalah kelompok yang muncul dan dibuat untuk menciptakan tekanan baik itu pada organisasi, suatu kelompok lain bahkan pemerintah dengan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan, legitimasi hingga realisasi dalam kepentingan mereka dimana kelompok ini muncul berdasar kepada kepentingan sosial, politik, agama, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan masyarakat lainnya yang dirasa belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak yang ditekan *pressure group*. *Pressure group* cenderung melakukan lobi dengan pemerintahan, melakukan advokasi media serta melakukan Tindakan langsung seperti protes yang bersifat terorganisir dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu kelompok penekan atau *pressure group* juga memiliki pengaruh yang berbeda beda, hal ini dikarenakan dengan adanya perbedaan kemampuan tiap kelompok penekan yang berbeda beda. *Pressure group* sangat penting untuk mengangkat isu-isu yang kurang terolah oleh pemerintahan atau bahkan tidak terkontrol oleh pemerintahan itu sendiri (Columbia University, 2018). Menurut Abbott pada tahun 1996 *pressure group* bekerja sebagai mekanisme dimana suatu diskusi serta tindakan dapat dilakukan dimana mekanisme ini kemudian berperan penting dalam membantu proses promosi kohesi sosial dan penerimaan

keputusan politik yang mengatur suatu masyarakat (Blake, 2021).

Dilihat dari tulisan diatas kita bisa mengetahui bahwa studi kasus yang saya ambil mengenai “Tekanan *Human Rights Watch* Pada Masa Pemerintahan Barack Obama Dalam Isu *Human Trafficking*” sangat cocok untuk menggunakan teori *Pressure Group* dalam pengerjaanya. Hal ini dikarenakan *Human Right Watch* adalah salah satu dari sekian banyak *non-government organization* atau NGO yang berfokus pada isu kemanusiaan serta menjadi pihak penekan pemerintahan dalam suatu negara untuk memperbaiki dan/atau membuat kebijakan mengenai isu tertentu serta telah berpengaruh bagi hampir semua negara di dunia. Kasus perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu yang menjadi sakit kepala semua negara didunia baik itu negara negara berkembang seperti Indonesia dan bahkan menjadi sakit kepala bagi negara *super power* Amerika Serikat. Dengan maraknya kasus perdagangan manusia inilah yang kemudian membuat peran NGO terutama NGO dalam bidang hak asasi manusia di dunia sangatlah penting. *Human Rights Watch* bekerja untuk mengangkat isu yang terjadi di dunia dan memberitahukan kita seberapa penting bagi kita untuk mengurangi, mencegah dan menghentikan kasus perdagangan manusia yang kian hari kian bertambah. *Human Rights Watch* bertanggung jawab untuk melakukan tekanan denganmelakukan gerakan gerakan sosial untuk menghentikan *human trafficking*, *Human Right Watch* juga berperan untuk melakukan jaringan advokasi dengan lembaganegara negara di dunia untuk melakukan regulasi kebijakan kebijakan untuk mengurangi dan menghentikan pergerakan perdagangan manusia baik dalam skala regional maupun dalam skala internasional dimana perdagangan manusia mengalami lintas batas negara negara di dunia. memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan ide ide baru dalam mencari solusi untuk menghentikan perdagangan

manusia di dunia dan juga memiliki hak untuk melakukan dokumentasi akan jumlah perdagangan manusia di berbagai negara di dunia seperti Amerika Serikat misalnya dan memberikannya sebagai informasi bagi masyarakat dan juga bisa menjadikannya sebagai bahan untuk melakukan lobi dengan lembaga pemerintahan negara yang didokumentasikan jumlah korban *human trafficking*nya (Isiksal, 2005).

D. Argumen Riset

Dengan menggunakan konsep *Pressure Group*, penelitian ini ingin menunjukkan tekanan yang dilakukan oleh *Human Right Watch* terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama menangani isu perdagangan manusia. *Human Rights Watch* melakukan penelitian berkala terhadap isu perdagangan manusia yang ditangani oleh pemerintahan Presiden Barack Obama yang dianggap tidak ditangani secara maksimal dengan melakukan pembukuan dan penerbitan laporan hasil penelitian dan menjadikannya barang bukti atau alat bagi *Human Rights Watch* menekan pemerintahan Presiden Barack Obama.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dimana ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperlihatkan atau menggambarkan fakta fakta yang ada dengan memanfaatkan data bersifat sekunder yang didapat dari buku, jurnal, berita maupun tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari teknik pengumpulan data kepustakaan (*Library Research*) dengan memanfaatkan data dan informasi dari buku, jurnal,

website, dan lainnya yang tentu dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari dan didapat oleh penulis selama perkuliahan melalui ulasan dan analisis dari studi kasus tekanan *Human Rights Watch* pada pemerintahan Presiden Barack Obama dalam kasus perdagangan manusia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tekanan *Human Right Watch* sebagai NGO yang bergerak dalam isu kemanusiaan terhadap pemerintahan Presiden Barack Obama dalam menangani isu perdagangan manusia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat menggunakan sistem penulisan deskriptif dimana pembahasannya akan berisikan sub-sub pokok yang menjelaskan permasalahan untuk menjawab pokok permasalahan diatas.

BAB 1 berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Argumen Riset, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 berisikan tentang kasus perdagangan manusia pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama serta bagaimana keterlibatan *Human Rights Watch* dalam mencegah kasus tersebut di Amerika Serikat.

BAB 3 menjelaskan mengenai tekanan yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* sesuai dengan strategi penekanan dalam teori *Pressure Group* dimana *Human Rights Watch* akan berperan sebagai pihak yang menekan pihak lain melalui mekanisme yang berbeda seperti *direct communication* dengan pemerintah ataupun melakukan penyusunan suatu laporan mengenai isu-isu yang diangkat kepada pemerintah yang kemudian menjadi dasar melakukan tekanan untuk memperbaiki atau membuat kebijakan terhadap isu yang diangkat dan dalam kasus-kasus yang diangkat adalah kasus perdagangan manusia. Bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana kemudian tekanan yang diberikan *Human Right Watch* berpengaruh pada tindakan pencegahan kasus perdagangan manusia pada masa presiden Barack Obama.

BAB 4 menjadi penutup atau menjadi bab akhir yang dibuat untuk menutup topik ini. Pada bab ini penulis akan berfokus pada menyimpulkan isi dari bab-bab yang sudah dibahas sebelumnya yang kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan dan saran.